

ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI SEKTOR KESEHATAN DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DI KABUPATEN ROKAN HULU

Pirman Hasonangan¹⁾, Makmur²⁾, Welven Aida³⁾
Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian

ABSTRACTION

This Research aim to to know strategy what better be done/conducte by Public Health Service Sub-Province of Rokan Pate;Upstream so that/ to be Earnings Of Tired Budget Area. Information in relating to done/conducted by strategy is Public Health Service of Rokan Pate;Upstream so that/ to be tired PAD as according to result of research, with data collecting technique pass/through interview and observation. Technique analyse Quantitative Descriptive data and test keapsahan of data with method of Check and of Recheck among/between source of data with source of other data. From result of research got that resistor factor in make-up of area retribution tariff shall be as follows: Lack of the amount of officer of service of transportation medium and retribution in retribution collection, wide of Area reach, Awareness of taxpayer still less, Lack of knowledge about Perda retribution. Of conclusion of done/conducted research result at Public Health Service Sub-Province of Rokan Pate;Upstream with amount of inpormen 8 people and use interview technique can be concluded that publishing Perda about more retribution so that earnings more is mounting, giving goals Earnings of Genuiness Area to each;every Puskesmas so that by the end of goals year determined by Tired Local Government, adding or fund mengoktimalkan which available to operational, giving kewenangan to acceptance bursar in puskesmas to remit to Kasda, doing/conducting agreement to acceptance bursar in puskesmas to remit earnings of tersebut puskesmas in remit to kasda or to Public Health Service in early month;moon, giving fee of punggut bonus or to at acceptance bursar in Public Health Service and of Puskesmas if reached by goals which

HALTED. CROSSING PARAGRAPH LIMITATION.

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia masih terus dilaksanakan walaupun sekarang ini keadaan negara yang kurang stabil. Pembangunan ini meliputi segala bidang aspek kehidupan, yang pada hakekatnya menciptakan suatu masyarakat yang

adil dan makmur bagi bangsa indonesia.

Dalam UU No. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan

dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah, juga menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin prosedur umum perpajakan dan Retribusi Daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem Pemerintah Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kesehatan masyarakat sebagai daerah otonomi.

Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu juga menjadikan sektor retribusi daerah sebagai sumber keuangan yang diandalkan.

Dari beberapa masalah dan target untuk meningkatkan SDM kita, tidak terlepas dari faktor ekonomi terutama masalah investigasi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas SDM supaya target pembangunan dimasa datang dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk meningkatkan Kualitas SDM perlu dipersiapkan mulai dari kebutuhan makanan yang menyangkut dengan perbaikan gizi. Untuk perbaikan Gizi pemerintah Indonesia memulai sejak PJP 1 (awal tahun 1980-an) yaitu diterapkannya pemakaian Air Susu Ibu (ASI), penyediaan posyandu dengan tenaga medis dan berbagai macam investigasi yang sangat besar sekali terutama untuk penyediaan sarana dan prasarana.

Menurut observasi peneliti, kejadian riil yang terjadi dilapangan saat ini target pendapatan tidak sesuai dengan terealisasi sehingga target yang di perlukan tidak mencukupi kebutuhan yang ada sehingga target pendapatan untuk di salurkan kepuskesmas minim setiap tahunnya selama 4 tahun yang di lihat oleh peneliti sesuai dengan data yang didapatkan oleh peneliti dari Dinas Kesehatan Rokan Hulu.

B. Rumusan Masalah

Analisis strategi apa saja yang sebaiknya dilakukan Dinas Kesehatan Rokan Hulu agar PAD tercapai?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Analisis strategi apa yang sebaiknya dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu agar Pendapatan Anggaran Daerah Tercapai?

D. Landasan Teori

1. Pengertian Pendapatan Daerah

Menurut Nurcholis (2007:182) Pendapatan Adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak, daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lainnya yang sah.

Menurut Undang –undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perintah daerah sumber pendapatan daerah umum membiayai APBD terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman Daerah

- d. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah (pasal 79 UU Pemda)

2. Upaya Peningkatan PAD

Menurut Hamrolie (2004:1) adalah

- Menaikkan tarif pajak dan retribusi daerah adalah
- Menetapkan Target PAD setiap tahun secara rasional

Dapis dalam Saprizal (2013 : 7) mengartikan strategi adalah alat untuk mencapai tujuan jangka panjang, merupakan tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan/organisasi dalam jumlah yang besar. Selain itu ditegaskannya bahwa strategi mempengaruhi kemakmuran organisasi dalam jangka panjang dan berorientasi masa depan. Strategi memiliki konsekuensi yang *multi fungsi* dan *multidimensi* serta perlu mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal yang dihadapi organisasi.

3. Strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

- Pemberdayaan
- Kemitraan
- Partisipasi

4. Analisis SWOT

SWOT adalah singkatan yang diambil dari huruf depan kata *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threat*, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.

Dapat kita lihat dari Tabel 2.4 dibawah ini sebagai berikut:

Faktor Internal	Strength(S)	Weaknesses(W)
Faktor Eksternal		
Opportunities (O)	STRATEGI (SO) Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.	STRATEGI (WO) Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
Threats (T)	STRATEGI (ST) Guna kekuatan untuk mengatasi ancaman.	STRATEGI (WT) Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Sumber Data: Fredy Rangkuti, 2009 : 31)

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu Komplek Bina Praja Kabupaten Rokan Hulu, dimulai sejak bulan Januari sampai Juni 2015

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif Kualitatif

Langkah-langkah dalam pengujian deskriptif kualitatif adalah sebagai berikut :

- Mengumpulkan data mentah
- Semuanya diketik persis seperti apa adanya
- Pembuatan koding/pemberian kode
- Kategori data
- Penyimpulan sementara
- Triagulasi
- Penyimpulan akhir

G. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu berdiri sejak

terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, dan Kota Batam. Keberadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu dinyatakan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2001, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara dengan beberapa responden dengan instansi yang terkait yang menjadi informen penelitian maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor pendorong yang menjadi kekuatan dan ada pula beberapa faktor penghambat yang menjadi ancaman, beserta strategi yang harus digunakan dalam meningkatkan tarif retribusi daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.

Adapun yang menjadi faktor pendorong dan penghambat menurut Indra Fibiona (2013) yaitu sebagai berikut:

- 1) Identifikasi faktor pendorong Kekuatan (*Strengths*)
 - Kualitas SDM
Dalam pemungutan retribusi sangat diperlukan sekali kualitas Sumber Daya Manusia yang dapat mendorong wajib retribusi untuk mematuhi aturan retribusi

- Penguasaan teknologi informasi oleh SDM
- Pimpinan yang tegas
Dalam hal ini dibutuhkan pimpinan yang mampu memberikan motivasi dan bersikap tegas pada bawahannya yang bertugas dalam pemungutan retribusi
- Potensi yang tinggi
Potensi untuk pengembangan PAD yang tinggi dengan adanya promosi tentang wajib retribusi
- Kualitas kerja yang bagus
Dalam pemungutan wajib retribusi saya bekerja semaksimal mungkin agar mencapai target

Peluang (*Opportunities*)

- Akses mudah
Akses wajib retribusi tidak jauh dan mudah dijangkau
- Adanya kerja sama lintas sektoral
- Adanya dukungan baik dari wajib retribusi maupun dari Dinas atau instansi terkait
- Saling berbaur dan saling mengingatkan antar instansi
- Saling berkomunikasi sesama instansi untuk membahas wajib retribusi

2) Identifikasi Faktor Penghambat Kelemahan (*Weaknesses*)

- Kurangnya fasilitas
Baik dari jumlah petugas maupun sarana dan prasarana dalam pemungutan retribusi

Ancaman (*Treats*)

- Pembangunan SDM belum memadai
- Kurangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab wajib retribusi

- Kurangnya pengetahuan tentang wajib retribusi
 - Lambatnya informasi diperoleh tentang retribusi
- 3) Analisis Faktor Pendorong
- a. Adanya Perda tentang retribusi Daerah
Adanya kapasitas hukum yang mengikat untuk menegaskan /menetapkan besar retribusi daerah sesuai dengan yang telah ditentukan
 - b. Tinggi Motivasi Pegawai
Dapat meningkatkan kinerja yang optimal dalam upaya pencapaian sasaran.
 - c. Tersedianya dana operasional
Menunjang dalam pelaksanaan tugas untuk operasional kegiatan.
 - d. Dukong dari Dinas terkait
Dukungan dari Instansi terkait akan memudahkan potensi dapat segera diperoleh yang merupakan dasar dari ketetapan retribusi
 - e. Adanya kerjasama dengan wajib retribusi
Adanya kerjasama dengan wajib retribusi akan memperlancar pembayaran retribusi daerah tepat waktu dan mendorong wajib retribusi berpartisipasi dalam meningkatkan PAD.
 - f. Potensi wajib retribusi cukup tinggi
Adanya beberapa sumber potensi retribusi yang masih/ belum tergali dan perluasan dunia usaha khususnya sektor perdagangan, hotel dan restoran
- 4) Analisis Faktor penghambat
- a. Kurangnya pengawasan
Adanya peluang untuk penyimpanan yang dilakukan oleh aparat
 - b. Kurang jumlah petugas pelayanan retribusi
Kurangnya jumlah petugas akan menghambat penagihan wajib retribusi
 - c. Kurangnya sarana transportasi
Kurangnya sarana transportasi akan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas.
 - d. Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah
Kurangnya kesadaran masyarakat akan menghambat kepada penerimaan dari retribusi daerah
 - e. Kurang pengetahuan masyarakat tentang retribusi
Kurangnya pengetahuan tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan retribusi akan menghambat kepada tingkat akurasi data yang dikelola oleh petugas retribusi
- Dari hasil wawancara, dimana untuk faktor pendorong dipilih 5 (lima) kekuatan kunci sebagai berikut:
- a. Adanya Perda tentang retribusi daerah
 - b. Mengali potensi Perda untuk meningkatkan PAD
 - c. Motivasi pegawai/instansi terkait
 - d. Adanya kerjasama dengan wajib retribusi,
 - e. Adanya potensi wajib retribusi yang tinggi
- Berdasarkan beberapa faktor diatas maka dapat kita lakukan beberapa strategi dalam meningkatkan tarif retribusi daerah sebagai berikut:
- a. Memanfaatkan perda sebagai panduan

- b. Dana operasional gunakan seefisien dan seefektif mungkin
- c. Lakukan penyuluhan lintas sektoral tentang wajib retribusi guna memotivasi pegawai terkait
- d. Optimalkan kerja sama dengan wajib retribusi
- e. Mengidentifikasi potensi wajib retribusi

Dari hasil wawancara dapat peneliti simpulkan bahwa faktor penghambat dalam peningkatan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya jumlah petugas pelayanan retribusi dan sarana transportasi dalam pemungutan retribusi
- b. Jangkauan daerah yang luas
- c. Kesadaran wajib retribusi masih kurang
- d. Kurangnya pengetahuan wajib retribusi tentang perda retribusi

Dari kesimpulan yang dapat peneliti ambil maka dapat dilakukan beberapa strategi pula untuk dapat meningkatkan retribusi daerah, yaitu sebagai berikut

- a. Perlu adanya penambahan petugas dan sarana transportasi dalam pemungutan retribusi daerah, untuk mencapai wilayah wajib retribusi yang luas
- b. Melakukan kembali sosialisasi retribusi daerah guna untuk mengingatkan kembali kesadaran wajib retribusi dan meningkatkan pengetahuan wajib retribusi akan setoran dan pelaporan yang dilakukan
- c. Memotivasi kembali Pegawai terkait untuk mengoptimalkan kinerja agar tercapainya target pendapatan.

H. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan. Pertama, hasil analisis strategi peningkatan PAD di sektor kesehatan dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu pada diagram *Cartesius* SWOT, dapat dilihat pada gambar 4.2 ada pada kuadran IV maka strategi yang dapat diteraokan yaitu:

1. Memanfaatkan perda sebagai panduan, dengan diterbitkannya perda tentang retribusi daerah maka Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu memanfaatkan perda tersebut sebagai panduan dalam pemungutan PAD di wilayah kerjanya
2. Mengidentifikasi potensi wajib pajak maka dapat menambah potensi wajib pajak yang lebih tinggi (optimal)
3. Menggunakan media masa, elektronik dan media cetak sebagai sarana penyuluhan kepada masyarakat atau badan usaha yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu tentang adanya perda yang diterbitkan tentang penyelenggaraan retribusi daerah tersebut.

Kedua, berdasarkan analisis pada kombinasi strategi matrik SWOT, dapat dilihat pada table 4.4 strategi yang efektif diperoleh startegi ST yaitu strategi yang menggunakan *Strenght* untuk mengatasi *Theat* yang ada. Adapun strategi ST tersebut dengan memanfaatkan perda sebagai panduan, mengidentifikasi potensi wajib retribusi, dan memberikan

penyuluhan kepada masyarakat atau badan usaha tentang perda yang diterbitkan dan memberikan informasi melalui media masa, elektronik dan media cetak.

I. Saran

Dalam meningkatkan PAD guna untuk melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu. harus memanfaatkan perda sebagai panduan, mengidentifikasi potensi wajib retribusi dan memberikan Kabupaten Rokan Hulu, Dinas Kesehatan kabupaten Rokan Hulu penyuluhan kepada masyarakat atau badan usaha tentang perda yang diterbitkan dan memberikan informasi melalui media masa, elektronik dan media cetak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Gara Ilmu
- Addullah. 2005. *Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pidie*, Fakultas Ekonomi Unsyiah, Darusalam, Banda Aceh
- Aswir. 2006. *Analisis Pendapatan Asli Daerah di Indonesia*, BPEF-UI : Jakarta
- DEA. Feliatra. dkk. 2011. *Metodologi Penelitian Persiapan Bagi peneliti Pemula*, Pekan Baru: Faperika Perss
- Davit.HHP://library.binus.ac.Id/eCol
ls/e Thesis/Babz/2009-2-
00734-Mn%20 bab-%202-pdf
- Guritno. *Ekonomi Public dan Aplikasi Ekonomi* BPEJ-UGM. Jogjakarta
- Hamrolie Harun. 2004. *Analisis Peningkatan PAD*. Edisi 2 : BPFE. Yogyakarta
- Is. Fitriyati. 2012. *Perpajakan I*. Universitas Pasir Pengaraian : UPP Perss
- _____. 2013. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 2*. Rokan Hulu Riau: Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian
- Kusnadi Arnita. 2004. *Sistem Perpajakan di Indonesia*. Alumni Bandung
- Kurniawan, dkk. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Bayumedia.
- Makmur & Saprijal. 2014. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 3*. Rokan Hulu Riau: Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian
- Nurcholis. 2007 *Teori dan praktek pemerintahan dan otonomi daerah* Jakarta: PT.Grasindo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No.9 tahun 2013
- Pheni Chalit. 2005. *Keuangan Daerah Investasi dan Desentralisasi Tantangan dan Hambatan*. Jakarta: Kemitraan untuk Pemerintahan yang baik
- Sibagariang. dkk. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : CV. Tarans Info Media
- Soekidjo. Notoadmodjo. 2010. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Sujar Wiratna. 2014. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

Undang –Undang Nomor 33 Tahun
2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah

Yani Ahmat. 2004. *Hubungan
Keuangan Antara
Pemerintahan Pusat dan
Daerah*. Jakarta:PT Raja
Grafindo Persada.